

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Komperensi dan Yoserizal

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Community Participation in Local Elections. The purpose of this study is to investigate and analyze the factors that influence people's participation in local elections Regency Kuantan Singingi Year 2011. This research was conducted in the district Singingi Kuantan, where the informant research is community leaders, religious leaders, youth leaders, prominent intellectuals, the Election Commission and the public. Data collected by interview and observation techniques, after the data was collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis. The result showed that people's participation in local elections in Kuantan District Singingi Year 2011 can be summed up quite well. While the factors most likely to influence people's participation in local elections in Kuantan District Singingi factor is the willingness and the capacity factor.

Abstrak: Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana yang menjadi informan penelitian adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh cerdik pandai, pihak KPUD dan masyarakat umum. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 dapat disimpulkan cukup baik. Sedangkan faktor yang paling cenderung memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor adanya kemauan dan faktor adanya kemampuan.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, partisipasi politik, demokrasi dan Pemilu.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Selanjutnya undang-undang ini juga diperjelas dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Tanggung jawab pelaksanaan pemilihan kepala daerah berada ditangan komisi pemilihan umum daerah (KPUD), yang didalam melaksanakan tugas pemilihan kepala daerah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) pusat. Sehingga petunjuk teknis atau pelaksanaan KPUD dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah berpedoman kepada peraturan yang disusun dan diterbitkan oleh KPU pusat. Mulai tentang aturan pendaftaran calon, kampanye,

standart dan prosedur pengadaan perlengkapan pemilihan kepala daerah sampai kepada tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suaran yang akan menjadi nilai akhir dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Demikian pula halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang pada tahun 2011 yang telah lalu, juga mengadakan pemilihan kepala daerahnya. Dalam pelaksanaannya KPUD Kabupaten Kuantan Singingi berpedoman kepada aturan yang sudah disusun oleh KPU sebagai petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sehingga dengan adanya pedoman tersebut akan lebih memudahkan KPUD Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerahnya. Daftar pemilih sementara yang berhasil dihimpun oleh KPUD sangatlah tinggi sekali mencapai 169.603 pemilih, namun setelah dilakukan klarifikasi dan pendataan ulang yang menjadi daftar pemilih tetap hanya sebanyak 164.658 pemilih. Sehingga

apabila diselesaikan ada sebanyak 4.945 calon pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap.

Faktor penyebab tidak terdaftar sebagai pemilih tetap umumnya kerana adanya perpindahan penduduk dan kematian penduduk yang tidak tercatat secara administrasi di pemerintahan tingkat desa ataupun kecamatan. Setelah dilakukan pemilihan, hasil perolehan suara yang diterima dari hasil pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dimenangkan oleh pasangan dengan nomor urut 1, dengan perbandingan persentase hasil perolehan suara 54,18 % berbanding dengan 45,82 %. Kondisi ini menjelaskan bahwa pasangan nomor urut 1 telah memenangkan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dengan selisih perolehan suara 8,36 %. Tetapi hasil perolehan suara ini secara keseluruhan menyisakan 12.032 daftar pemilih tetap yang tidak menggunakan hak suaranya. Alasan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya bisa saja disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakpedulian masyarakat akan kegiatan pemilukada, banyaknya masyarakat yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak berdomisili di daerah pendaftaran dan sebagainya. Fakta ini menjelaskan bahwa masih belum maksimal partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah, dengan berbagai alasan dan penyebab yang berbeda-beda.

Begitu juga dengan para pemilih yang golput termasuk kedalam masyarakat yang rendah partisipasinya. Karena golput dari data yang diperoleh merupakan ketidakmampuan masyarakat untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan kepala daerah. Sebab masyarakat yang terdaftar tadi tidak menggunakan hak suaranya dengan berbagai alasan, misalnya kesibukkan masyarakat yang membuat mereka tidak melakukan pemilihan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Padahal pemilihan kepala daerah merupakan ajang pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat di daerah. Artinya masyarakat dapat menentukan sendiri siapa putra terbaik daerah yang akan memimpin wilayahnya dalam waktu 5 tahun

ke depan. Sehingga proses pemilihan kepala daerah akan sangat penting dalam menentukan calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berpengalaman untuk memimpin suatu daerah, serta menilai kemampuan pemimpin daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan mensejahterahkan masyarakat daerah.

Realita ini tentunya sangat memprihantinkan dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Karena pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah merupakan kegiatan pesta rakyat atau penyampaian keinginan rakyat dengan memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan kriteria dan karakteristik yang diinginkan. Sebab dalam proses pemilihan umum kepala daerah yang sudah dilakukan secara langsung, masyarakat bisa secara jelas dan lugas melihat sosok calon yang akan menjadi kepala daerah di wilayahnya. Oleh karenanya ada fakta yang menjelaskan bahwa masih ada masyarakat yang tidak berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum kepala daerah, membuktikan bahwa rendah partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan selain agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya masyarakat juga dapat mengetahui itikad baik pemerintah. Masyarakat sadar akan pembangunan melalui partisipasi karena suatu pembangunan dari rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban masyarakat oleh karena itu pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat tersebut melalui produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang jelas tentang pembangunan melalui partisipasi masyarakat, dan sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat mereka harus berperan aktif demi terlaksananya pembangunannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory* atau *confirmatory*) tentang fenomena partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2011 di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2011 di Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah lebih mengarah kepada partisipasi politik. Dimana partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Penggunaan partisipasi politik dapat berbentuk otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi (*mobilized participation*). Pada umumnya orang beranggapan bahwa demonstrasi, teror, pembunuhan (lawan) politik, dan bentuk kekuasaan lain yang bermotif politik juga merupakan bentuk partisipasi. Metode atau cara berpartisipasi, intensitasnya terkait dengan keterikatan atau posisi politik yang dimiliki seseorang.

1. Partisipasi dalam Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan memberikan kontribusi yang positif bagi kendala atau hambatan yang selama ini ditemukan di lapangan. Misalnya saja dalam mengatasi rendahnya keinginan masyarakat pemilih untuk melakukan pemilihan sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditetapkan. Fakta ini sering menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan. Oleh karena itu masyarakat dilibatkan dalam menyusun rencana untuk membangkitkan keinginan masyarakat pemilih untuk melaksanakan haknya. Gambaran teknis yang diberikan oleh masyarakat yang terlibat dalam perencanaan akan memberikan solusi dalam mengurangi angka golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Perencanaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan sangatlah penting termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Sebab perencanaan itu penting adalah : *Pertama*, karena perencanaan yang disusun akan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan, seperti dalam pemilihan kepala daerah dapat dijadikan prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan. *Kedua*, karena dengan adanya perencanaan akan dapat memperkirakan (*forecasting*) kegiatan yang akan dilaksanakan. Artinya dalam pemilihan kepala daerah, organisasi pelaksana sudah bisa memperhitungkan hambatan dan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. *Ketiga*, karena dengan adanya perencanaan dalam disusun alternatif-alternatif pilihan yang terbaik untuk melaksanakan kegiatan. Dimana dalam pemilihan kepala daerah, implementor dapat memilih dan menentukan alternatif pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang terbaik dan memiliki tingkat resiko yang rendah. *Keempat*, karena dengan adanya perencanaan dapat ditentukan skala prioritas. Artinya dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, implementor dapat menentukan tahapan mana yang menjadi skala prioritas untuk perlu serius dan hati-hati untuk dilakukan.

Kelima, karena dengan adanya perencanaan organisasi pelaksana dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Dimana dalam pemilihan kepala daerah, KPUD dapat mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk mengetahui kelemahan dan hambatan yang ditemui serta mengevaluasinya agar tidak terjadi kembali pada pemilihan kepala daerah yang berikutnya.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Operasional

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan operasional pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 sudah cukup baik, artinya masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang baik disaat ada pemberitahuan tentang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Dimana pembukaan pendaftaran anggota PPK dan PPS yang dilakukan oleh KPUD sangat antusias diikuti oleh masyarakat di setiap wilayah. Tingginya keinginan masyarakat untuk ikutserta dan terlibat dalam kegiatan pemilihan kepala daerah ini membuktikan bahwa masyarakat ingin mengambil peranan yang penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan. Oleh karena itu begitu proses penetapan anggota PPK dan PPS sudah terlaksana, masyarakat yang terpilih juga sangat memiliki *political will* untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan oleh KPUD terhadap seluruh anggota PPK dan PPS dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Keseriusan mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan mengisyaratkan masyarakat memiliki komitmen dan ekspektasi yang tinggi terhadap tugas dan beban kerja yang diberikan. Fakta ini ditunjukkan masyarakat dilapangan dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Setiap anggota PPK dan PPS yang sudah terpilih mempersiapkan diri untuk menyediakan alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Walaupun peralatan inti pelaksanaan pemilihan kepala daerah telah disediakan oleh KPUD, seperti kotak suara, surat suara, tinta suara dan

sebagainya. Namun dalam penyediaan sarana lainnya harus dilakukan oleh masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, seperti tempat pencoblosan, kursi, meja dan sebagainya. Komitmen ini menunjukkan bahwa masyarakat memang sangat mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan segala kemampuan dan yang dimilikinya. Walaupun dalam realita pelaksanaannya masih ada yang terlambat hadir, tetapi masih bisa diatasi oleh anggota PPK dan PPS lainnya agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap berjalan.

3. Partisipasi dalam Menerima Hasil

Ketidaksiapan masyarakat menerima hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah semata-mata bukan karena adanya dukungan yang diberikan, namun karena adanya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Biasanya kecurangan yang dipahami oleh masyarakat adalah sebatas teknis pelaksanaan pemilihan yang dilakukan, yang tentunya terjadi pada hari "H" pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Indikasi kecurangan dalam pelaksanaan kepala daerah biasanya terjadi dalam beberapa hal : *Pertama*, prosedur pencoblosan yang dilakukan. Dimana dalam proses penjoblosan yang dilakukan biasanya masyarakat diwajibkan menunjukkan kartu pemilihnya dan disesuaikan dengan KTP yang dimiliki. *Kedua*, waktu pencoblosan, dimana dalam proses pencoblosan yang dilakukan penitia pelaksana atau PPS tidak konsisten terhadap waktu yang diberikan. Bisa saja waktu pencoblosan dimulai lebih cepat atau lebih lambat dan penutupannya lebih cepat atau lebih lambat. Akibatnya ada masyarakat yang belum sempat mencoblos sudah tutup dan menjadi salah satu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Apalagi petugas PPS kurang mensosialisasikan waktu pencoblosan yang dilakukan. *Ketiga*, penghitungan surat suara. Dimana dalam proses penghitungan yang tidak teliti bisa merugikan salah satu pasangan calon atau sebaliknya menguntungkan salah satu pasang calon. Fakta ini yang sering ditemukan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan bersama tidak sesuai dengan hasil yang dilaporkan

ke PPK untuk direkapitulasi dari masing-masing TPS. Kecurangan-kecurangan seperti inilah yang membuat masyarakat kurang memiliki kepercayaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang JURDIL.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah

Tujuan dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya. Secara spesifik partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau kelompok yang terkena oleh suatu keputusan-keputusan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Untuk melakukan indentifikasi akan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat merupakan tahap yang krusial dalam merealisasikan partisipasi tersebut. Sebab ketidakmampuan pemerintah dalam membangkitkan partisipasi masyarakat akan membuat masyarakat kurang peduli akan program-program pemerintah yang dilaksanakan.

1. Adanya Kesempatan

Masyarakat diberikan kesempatan yang seluasnya oleh pelaksana pemilihan kepala daerah untuk berpartisipasi dalam bidang apa atau hal apa. Artinya KPUD dan pemerintah daerah membuka kesempatan yang seluasnya bagi masyarakat untuk menentukan pilihan ingin ikut aktif atau pasif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011. Kesempatan yang diberikan meliputi berbagai bidang diantaranya: *Pertama*, masyarakat diberikan kesempatan untuk menjadi petugas pelaksana kegiatan pemilihan kepala daerah. Dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui KPUD. *Kedua*, masyarakat diberikan kesempatan untuk menjadi tim sukses dari salah satu pasangan calon. Artinya masyarakat boleh memberikan dukungan

kepada salah satu pasangan calon yang dianggapnya memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tinggi. *Ketiga*, diberikan kesempatan untuk menjadi pemilik hak suara atau pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dimana masyarakat yang memiliki identitas diri sebagai warga di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berhak menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang penting kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sudah dipenuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. *Keempat*, adanya kesempatan masyarakat untuk menjadi golput atau tidak menyalurkan hak suaranya. Dari data yang diterima ada sebanyak 12.032 masyarakat yang terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya bisa bermacam-macam, diantaranya karena ketidakpedulian masyarakat akan kegiatan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan.

2. Adanya Kemauan

Kemauan yang dimiliki masyarakat untuk peduli akan kegiatan pemilihan kepala daerah sebagian besar masih belum baik. Sebab masih ditemukan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih sebanyak 4.945 jiwa, padahal sebelumnya mereka terdaftar sebagai pemilih sementara. Kemudian ada sebanyak 12.032 daftar pemilih tetap yang tidak menggunakan hak suaranya, ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kemauan yang rendah agar bisa mengikuti proses pemilihan kepala daerah. Fakta ini menjelaskan bahwa kemauan masyarakat untuk berpartisipasi masih ada yang rendah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sehingga wajar saja ditemukan data-data tentang masyarakat yang tidak terdaftar dan masyarakat yang terdaftar tetapi tidak melaksanakan haknya. Rendahnya kemauan masyarakat ini bisa saja disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, rendahnya pendidikan politik masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. *Kedua*, tingginya ketidakpedulian masyarakat akan kegiatan pemilihan kepala daerah yang dilakukan. Fakta ini juga melanda hampir seluruh masyarakat disetiap wilayah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Faktor utama yang menyebabkan adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah.

3. Adanya Kemampuan

Masyarakat masih memiliki kemampuan yang kurang baik terhadap pelaksanaan haknya sebagai pemilih dan menerima hasil pemilihan yang dilangsungkan. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk bisa melaksanakan hak pilihannya disebabkan oleh pendidikan dan pemahaman masyarakat yang terbatas akan pemilihan kepala daerah atau pemilih. Akibatnya masyarakat masih belum paham menggunakan hak suara yang dimilikinya untuk bisa mengikuti kegiatan pemilihan kepala daerah. Sehingga masih ada masyarakat yang kurang peduli akan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan. Dampaknya masih ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Fakta ini membuktikan bahwa memang masih ada masyarakat yang memandang tidak penting pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu, sehingga dirinya tidak memiliki kepentingan untuk menyalurkan suara yang dimiliki. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk memahami betapa pentingnya mengikuti kegiatan pemilihan kepala daerah ini memang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat akan kegiatan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu dibutuhkan penyuluhan atau sosialisasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga masyarakat bisa memiliki pemahaman yang baik dan mampu untuk memberikan hak suaranya dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

SIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 dapat disimpulkan cukup baik. Artinya masyarakat masih memiliki iktikad yang cukup baik untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011. Kondisi ini bisa

saja disebabkan oleh ketidakinginan masyarakat untuk melakukan atau mengikuti proses pemilihan kepala daerah. Sehingga begitu waktu pelaksanaan tiba, masyarakat tersebut tidak peduli dengan kegiatan pesta rakyat yang dilakukan. Alasan lainnya masyarakat tidak menggunakan hak suaranya bisa saja disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya rendahnya partisipasi masyarakat, banyaknya masyarakat yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak berdomisili di daerah pendaftaran dan sebagainya. Ditemukan faktor yang paling cenderung memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor adanya kemauan dan faktor adanya kemampuan. Faktor adanya kemauan yang merupakan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik secara pasif dan aktif ternyata memberikan pilihan kepada masyarakat untuk tidak ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Akibatnya masyarakat kurang memiliki kemauan atau inisiatif apabila tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sedangkan faktor kemampuan merupakan upaya yang dilakukan agar masyarakat bisa melaksanakan hak pilihnya dan menerima hasil pemilihan yang diselenggarakan. Fakta ini terjadi tidak berjalan dengan lancar, karena kemampuan masyarakat memang masih rendah untuk bisa melaksanakan hak pilih dan menerima hasil pemilihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adman Nursal. 2004. *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cohen. 1997. *Rural Development Partisipation*. Cornell Univ. Press, Jakarta.
- Dimar. 2004. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. CV. Ciproy, Jakarta.
- Sudriamunawar, Haryono. 2006. *Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas*. Mandar Maju, Bandung.
- Sukanto. 1993. *Beberapa Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. CSIS, Jakarta.